KAPER OMBUDSMAN KALTENG INGATKAN MITIGASI RISIKO DALAM PILKADA PENTING UNTUK DILAKUKAN

Kamis, 05 November 2020 - Meigi Bastiani

Pada Kamis (5/11/20), Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Tengah, R. Biroum Bernardianto menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Tahapan Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang berlangsung di Swissbell Hotel Danum, Palangka Raya ini diselenggarakan oleh Bawaslu Kalteng, bertujuan untuk menjalin koordinasi antar instansi terkait dalam hal persiapan pengawasan Pilkada di Kalteng tahun 2020.

Dalam paparannya, Biroum menyampaikan beberapa hal terkait sinergitas Ombudsman dengan Bawaslu pada Pilkada 2020. "Pilkada tahun ini dihadapkan pada beberapa resiko, salah satunya resiko penularan Covid-19, resiko pemanfaatan fasilitas pemerintah, dan sebagainya. Untuk itu, mitigasi-mitigasi resiko yang telah disiapkan wajib diterapkan secara ketat agar kejadian yang tidak diinginkan dapat dihindari", ujar Biroum. Selain itu, Biroum menjelaskan bahwa persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan finansial untuk pencegahan resiko-resiko tersebut perlu dioptimalkan agar Pilkada tahun ini dapat berjalan lancar, kondusif, dan transparan.

Ombudsman Kalteng dalam waktu dekat akan mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bawaslu Kalteng terkait penanganan laporan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Diharapkan dengan adanya PKS tersebut nantinya koordinasi antara Ombudsman Kalteng dan Bawaslu Kalteng akan semakin baik, khususnya dalam hal optimalisasi fungsi pengawasan yang dimiliki masing-masing lembaga.

Biroum menyampaikan partisipasi masyarakat dalam hal Pilkada adalah hal yang sangat vital untuk peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat itu sendiri. Selain itu, hal ini dapat mencegah gerakan pembangkangan publik dan menjaga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Di akhir kesempatan Biroum menyatakan siap mengawal jalannya Pilkada di Kalteng tahun ini dengan baik dan sesuai kewenangan Ombudsman. "Kami terbuka bagi siapapun yang ingin berkonsultasi atau menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Kami akan tanggapi dan tindaklanjuti tentunya sesuai kewenangan yang melekat pada Ombudsman", tutup Biroum.